

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI SEKOLAH DASAR

Hafizah Ghany H.¹
hafizah.ghany@gmail.com

Abstract

This paper reviews the implementation of education for sustainable development (EfSD). It includes the definitions of sustainable development, education for sustainable development, and its implementation at elementary school level. EfSD concept integrate learning strategy with knowledge (about social, economy, environment), issues, skill, perspectives and values on sustainable development. EfSD can stimulate changes in the perspectives of people, inspiring them to create a safer, healthier, and sustainable life. Educational policy in Indonesia about graduate competence and content standard for elementary students has in line with EfSD concept. Some school in Indonesia has already integrate EfSD concept on their learning process, but based on the results, the process still need some improvement.

Keywords: sustainable development, education for sustainable development

A. Pendahuluan

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat membuat aktivitas manusia semakin bervariasi. Berdasarkan data Statistik Lingkungan Hidup Indonesia tahun 2017 diketahui bahwa hasil evaluasi pencemaran air menunjukkan peningkatan persentasi titik pantau dengan status tercemar², deforestasi juga terus mengalami peningkatan dari tahun 2009-2015. Total deforestasi Indonesia pada 2014-2015 seluas 1,09 juta hektar. Deforestasi terluas di Pulau Sumatera, yaitu sebesar 519,0 ribu hektar atau 47,5 persen dari total deforestasi di Indonesia, diikuti Pulau Kalimantan sebesar 34,3 persen.³ Aktivitas manusia di bumi yang semakin meningkat tentu berdampak pada keseimbangan lingkungan.

¹ IAIN Pekalongan

² Subdirektorat Statistik Lingkungan Hidup. (2017). *Statistik Lingkungan Hidup Indonesia 2017*. Jakarta: Badan Pusat Statistik. Hlm 15

³ Subdirektorat Statistik Lingkungan Hidup. (2017). *Statistik Lingkungan Hidup Indonesia 2017*. Jakarta: Badan Pusat Statistik. Hlm 89

Berangkat dari hal tersebut, muncul konsep mengenai pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk memastikan suatu pembangunan yang dilakukan dapat memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengurangi atau menghilangkan kesempatan bagi generasi di masa depan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dari definisi tersebut, meskipun tidak dituliskan secara jelas, terdapat keterkaitan pembangunan berkelanjutan dengan aspek lingkungan.

Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan tidak dapat dipisahkan dari aspek lingkungan. Kesadaran untuk menjaga lingkungan dalam proses pembangunan akan memastikan keberlanjutan lingkungan untuk generasi masa depan. Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan memerlukan kesadaran secara global dan nasional, dengan melibatkan semua pihak seperti pemerintah, pelaku industri dan pelaksana pendidikan. Setiap pihak memiliki peran untuk melakukan langkah yang dapat mengurangi dampak negatif pembangunan terhadap lingkungan dan meningkatkan kualitas lingkungan bagi masa depan.

Pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (selanjutnya disebut PuPB) memegang peran penting dalam tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan. PuPB merupakan konsep multidisiplin yang melihat konsep pembangunan dari perspektif sosial, ekonomi, dan lingkungan. Konsep ini sudah tertuang dalam Undang-undang no 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional tentang tujuan pendidikan nasional yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab⁴. Salah satu bentuk warga negara yang berakhhlak mulia dan bertanggung jawab adalah dapat memenuhi kebutuhan saat ini, tanpa mengesampingkan kewajiban menjaga kelangsungan lingkungan bagi generasi mendatang.

Pendidikan dasar sebagai jenjang pertama dalam sistem pendidikan memiliki peran penting dalam penerapan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan. Negara telah mewajibkan agar setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar⁵. Penerapan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan di sekolah dasar akan memastikan setiap siswa memahami hubungan antara kesadaran manusia sebagai bagian dari alam dan sistem sosial di dalamnya dan bertanggung jawab pada kelestarian alam untuk masa sekarang dan masa

⁴ Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta. Hlm 4.

⁵ Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta. Hlm 5.

akan datang. Siswa yang telah dibekali pemahaman mengenai pembangunan berkelanjutan diharapkan dapat menerapkan pengetahuan yang telah didapatkan dalam kehidupannya, sehingga kehidupan di bumi dapat berjalan dengan seimbang.

Pelaksanaan PuPB tidak hanya dilakukan oleh institusi pendidikan, tetapi juga membutuhkan dukungan dari pemerintah, pelaku industri, dan semua elemen masyarakat. Dalam jurnal ini, penulis berusaha memaparkan mengenai PuPB, urgensi, dan penerapannya di sekolah dasar. Penulisan jurnal dilakukan berdasarkan studi pustaka terkait pembangunan berkelanjutan, pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan, dan pelaksanaan PuPB pada pendidikan dasar di Indonesia.

B. Pembahasan

1. Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan merupakan istilah terjemahan dari istilah bahasa Inggris *sustainable development*. Definisi pembangunan berkelanjutan menurut *The Brundtland Commission's* (1999) adalah “*ability to make development sustainable to ensure that it meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs*”.⁶ Dalam studi lanjutan mengenai pembangunan berkelanjutan, *Board on Sustainable Development of the U.S. National Academy of Sciences* membagi fokus pembahasan menjadi aspek yang perlu dipertahankan (*to sustain*) dan yang perlu dibangun (*to develop*), hubungan antara kedua hal tersebut dan gambaran jangka waktu pelaksanaan.⁷

Di Indonesia, definisi pembangunan berkelanjutan menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.⁸ Berbagai definisi mengenai pembangunan berkelanjutan tersebut mengarahkan kita untuk memandang dunia ini sebagai sebuah sistem dimana manusia merupakan bagian dari sistem. Setiap tindakan yang dilakukan oleh

⁶ National Research Council. (1999). *Our Common Journey: A Transition Toward Sustainability*. Washington DC: National Academy Press. Hlm 23.

⁷ Kates, R., Parris, T., & Leiserowitz, A. (2005, April). What is Sustainable Developments? Goals Indicators, Values and Practises. *Environment Science and Policy for Sustainable Development*. Hlm. 11.

⁸ Republik Indonesia. (2009). *Undang-undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta. Hlm 3.

manusia di bagian manapun di bumi akan berdampak pada bagian bumi yang lain.

Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan telah dibahas dalam berbagai forum internasional. Kesepakatan Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke 70 pada bulan September 2015 di New York, Amerika Serikat, tertuang dalam dokumen berjudul *Transforming Our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development* berisi 17 Tujuan dan 169 Sasaran yang berlaku mulai tahun 2016 hingga tahun 2030. Dokumen ini dikenal dengan istilah *Sustainable Development Goals* atau SDGs. SDGs merupakan kelanjutan dari *Millennium Development Goals* (MDGs) yang telah disepakati oleh negara anggota PBB pada tahun 2000-2015.⁹ SDGs mengakomodasi masalah pembangunan secara lebih komprehensif baik kualitatif maupun kuantitatif menargetkan penyelesaian tuntas terhadap setiap tujuan dan sasarannya. SDGs juga bersifat universal memberikan peran yang seimbang kepada seluruh negara untuk berkontribusi penuh terhadap pembangunan.

Pemerintah Indonesia menetapkan Undang-undang No 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). TPB bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.¹⁰ Pelaksanaan TPB dilakukan oleh pemerintah yaitu kementerian dan pemerintah daerah, serta ormas, filantropi, pelaku usaha, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya.

2. Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan (PuPB)

Pendidikan memiliki peran penting untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Melalui proses pendidikan dapat ditanamkan pemahaman mengenai konsep pembangunan berkelanjutan dan urgensinya. Pendidikan secara langsung berpengaruh pada pembangunan berkelanjutan dalam tiga area berikut: (1) implementasi: penduduk yang berpendidikan lebih mudah dalam menerima informasi dan mengimplementasikan pembangunan berkelanjutan; (2) pengambilan keputusan: keputusan masyarakat yang baik dalam hal sosial, ekonomi, dan lingkungan- bergantung pada tingkat

⁹ Panuluh, S., & Fitri, M. R. (2016). *Perkembangan Pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia September 2015-September 2016*. International NGO Forum on Indonesian Development. Hlm 4.

¹⁰ Republik Indonesia. (2017). *Undang-undang No 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)*. Jakarta. Hlm 4.

pendidikan masyarakat tersebut; (3) kualitas hidup: pendidikan merupakan salah satu faktor yang menentukan kualitas hidup manusia.¹¹

Istilah pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan dapat diartikan bahwa pendidikan merupakan salah satu alat untuk mencapai kondisi berkelanjutan (*sustainability*). PuPB memberikan pandangan untuk menyeimbangkan kehidupan manusia dan perbaikan ekonomi dengan tetap menjaga tradisi dan penghormatan terhadap lingkungan. Lampa (2012) menyatakan PuPB atau *ESD (Education for Sustainable Development)* represents a holistic interdisciplinary learning strategy, based on values, critical thinking, cross-methodological approaches, decision making policies that intends to assist young people in dealing with an increasingly changing and challenging world.¹²

Unesco menjabarkan 4 tujuan PuPB, yaitu: 1) Meningkatkan akses dan hak atas pendidikan dasar yang berkualitas; 2) Reorientasi program pendidikan yang sudah ada ke arah keberlanjutan; 3) Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai keberlanjutan; 4) Menyediakan latihan untuk semua bidang pekerjaan.¹³ PuPB lebih dari pengetahuan dasar yang berhubungan dengan lingkungan, ekonomi, dan masyarakat sosial. PuPB juga mengarahkan pada pencapaian keterampilan, perspektif, dan nilai-nilai yang memotivasi manusia untuk mencapai kehidupan yang berkelanjutan, berpartisipasi dalam masyarakat dan menerapkan prinsip *sustainability* dalam kehidupan. Penerapan PuPB melibatkan pembelajaran mengenai isu lokal dan apresiasi isu global.

Relevansi PuPB dengan berbagai konteks tertuang dalam *Sustainable Development Lens: A Policy and Practice Review Tool* oleh Unesco (2010), dimana disebutkan bahwa *Education for Sustainable Development is relevant to everyone, at whatever stage of life they are and in any context. ESD is an integral part of lifelong learning, engaging all possible learning spaces formal, non formal and informal, from early childhood to adult life. A wholesystem approach to ESD involves close integration of the aims of education with the broad span of social, economic, environmental and cultural policies for sustainable development.*¹⁴ PuPB relevan untuk setiap orang, pada tahapan hidup apapun dan dalam konteks apapun. PuPB

¹¹ Unesco. (2006). *Education for Sustainable Development Toolkit*. Paris: Unesco Education Sector. Hlm 14-15

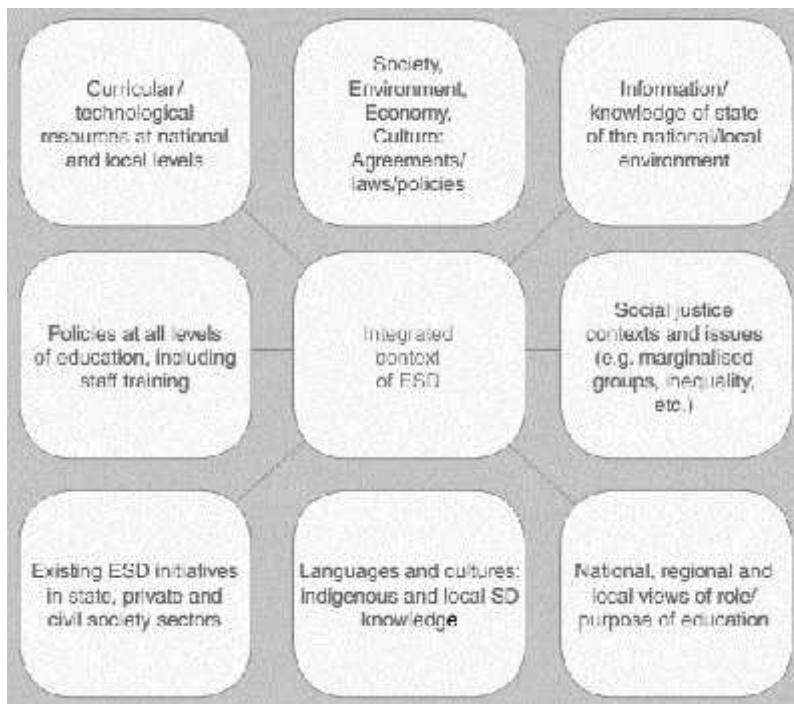
¹² Lampa, I., Greculescu, A., & Todorescu, L.-L. (2012). Education for Sustainable Development – Training the Young. *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 78, Hlm. 120

¹³ Unesco. (2006). *Education for Sustainable Development Toolkit*. Paris: Unesco Education Sector. Hlm 15.

¹⁴ Unesco. (2010). *Education for Sustainable Development Lens: A Policy and Practice Review Tool*. Paris: Unesco Education Sector. Hlm. 13

merupakan bagian integral dari pembelajaran sepanjang hayat dan semua bentuk pendidikan. Seluruh sistem dalam PuPB melibatkan integrasi dengan tujuan pendidikan dengan jangkauan luas pada bidang sosial, ekonomi, lingkungan, dan aturan kultural untuk pembangunan berkelanjutan. Konteks yang terintegrasi dalam PuPB terdapat pada gambar 1.

Gambar 1. Integrasi konteks dalam PuPB



Sumber: *Sustainable Development Lens: A Policy and Practice Review Tool* (2010)

Merujuk pada konteks tersebut, tidak ada satu disiplin ilmu yang dapat mengklaim bahwa PuPB hanya terkait pada satu ilmu. Beberapa literatur telah menyebutkan keterkaitan sains dan ilmu lingkungan dengan PuPB. Namun, dalam prakteknya PuPB juga membutuhkan kontribusi dari berbagai disiplin ilmu lain misalnya:

- a. Matematika membantu siswa untuk memahami angka sehingga dapat menginterpretasikan suatu data;
- b. Bahasa, terutama kemampuan literasi dapat membantu siswa untuk menganalisis suatu pesan atau isu dan membangun kemampuan untuk membedakan fakta dan opini, serta membantu siswa untuk menjadi pembaca yang kritis;

- c. Sejarah mengajarkan siswa tentang perubahan global;
- d. Ilmu sosial membangun kemampuan untuk mengenali dan memahami isu-isu sosial yang berkembang di masyarakat.

Setiap disiplin ilmu juga dihubungkan dengan teknik-teknik pedagogis. Kombinasi tersebut berkontribusi pada visi bagaimana mengajarkan kreativitas, berpikir kritis, dan menumbuhkan kemauan untuk belajar sepanjang hayat, serta semua kebiasaan yang akan mendukung tercapainya masyarakat yang berkelanjutan.¹⁵

PuPB memiliki potensi untuk mengintegrasikan beberapa area pada kurikulum, termasuk pendidikan untuk masa depan, kewarganegaraan, pendidikan untuk perdamaian, pendidikan multikultural dan gender, pendidikan kesehatan, pendidikan lingkungan, dan literasi media. PuPB juga memberikan dasar bagi pengembangan kurikulum secara lebih jauh, misalnya mengembangkan pemahaman siswa pada aspek ekonomi, termasuk di dalamnya adalah sikap positif dalam memandang pemasukan dan pengeluaran agar dapat seimbang.¹⁶ Laurie (2016) menyatakan bahwa *research also provides evidence that ESD pedagogies facilitate the learning of knowledge, and promote the learning of skills, perspectives and values necessary to foster and maintain sustainable societies.*¹⁷

3. Penerapan PuPB di Sekolah Dasar

Proses belajar esensial dalam PuPB adalah mendorong siswa untuk berpikir kritis, sistematis, dan menggunakan berbagai sudut pandang. Salah satu urgensi penerapan PuPB pada pendidikan dasar adalah untuk membangun apresiasi kritis siswa terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Peneliti di 14 negara telah melaporkan bahwa siswa pada sekolah dengan PuPB memiliki kemampuan berpikir kritis yang kuat, pemahaman lebih mendalam dalam belajar dan kemampuan untuk meneliti.¹⁸

Dalam proses reorientasi kurikulum dengan konsep PuPB, terdapat lima komponen yang perlu diperhatikan yaitu pengetahuan, isu-isu, keterampilan, perspektif, dan nilai-nilai pokok untuk pembangunan berkelanjutan dalam setiap aspeknya (lingkungan, sosial, dan ekonomi). Pembuat kebijakan dalam

¹⁵ Unesco. (2006). *Education for Sustainable Development Toolkit*. Paris: Unesco Education Sector. Hlm 14.

¹⁶ Blatchford, J., Smith, K. C., & Samuelsson, I. P. (2010). *ESD in Early Years*. World Organization for Early Childhood Education. Hlm 10.

¹⁷ Laurie, R., Tarumi, Y. N., McKeown, R., & Hopkins, C. (2016). Contributions of Education for Sustainable Development (ESD) to Quality Education: A Synthesis of Research. *Journal of Education for Sustainable Development* 10:2 . Hlm 240.

¹⁸ Laurie, R., Tarumi, Y. N., McKeown, R., & Hopkins, C. (2016). Contributions of Education for Sustainable Development (ESD) to Quality Education: A Synthesis of Research. *Journal of Education for Sustainable Development* 10:2 . Hlm 234.

bidang pendidikan juga perlu memutuskan isu terkait keberlanjutan yang akan menjadi bagian dalam kurikulum. Idealnya, isu yang dipilih merupakan isu lokal atau nasional yang berhubungan dengan pembangunan berkelanjutan.

Secara umum, pelaksanaan pendidikan dasar di Indonesia diatur oleh Permendikbud No 20-22 tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan (SKL), Standar Isi, dan Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah. Berdasarkan penjabaran dalam SKL dan standar isi dapat dikatakan bahwa pelaksanaan kurikulum 2013 di sekolah dasar telah mengintegrasikan konsep PuPB dimana proses pembelajaran di SD/MI/SDLB/paket A diharapkan dapat menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi sosial berupa sikap yang baik, pengetahuan mengenai IPTEK, seni dan budaya, serta keterampilan berpikir dan bertindak kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif yang sangat dibutuhkan dalam mewujudkan masyarakat yang berkelanjutan.

Berikut penjabaran SKL berdasarkan Permendikbud No 20 Tahun 2016:

a. Dimensi sikap.

Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap: 1. beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, 2. berkarakter, jujur, dan peduli, 3. bertanggungjawab, 4. pembelajar sejati sepanjang hayat, dan 5. sehat jasmani dan rohani sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, dan negara.

b. Dimensi pengetahuan.

Memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat dasar berkenaan dengan: 1. ilmu pengetahuan, 2. teknologi, 3. seni, dan 4. budaya. Mampu mengaitkan pengetahuan di atas dalam konteks diri sendiri, keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, dan negara.

c. Dimensi keterampilan.

Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak: 1. kreatif, 2. produktif, 3. kritis, 4. mandiri, 5. kolaboratif, dan 6. komunikatif melalui pendekatan ilmiah sesuai dengan tahap perkembangan anak yang relevan dengan tugas yang diberikan.¹⁹

Untuk mencapai SKL yang telah ditetapkan, perlu penjabaran kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Penjabaran tersebut tertuang dalam standar isi dimana kompetensi yang bersifat generik mencakup 3 (tiga) ranah

¹⁹ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2016). *Permendikbud No 20 tentang Standar Kompetensi Lulusan*. Jakarta. Hlm. 3-8

yakni sikap, pengetahuan dan keterampilan, pada ranah sikap dipilah menjadi sikap spiritual dan sikap sosial. Pemilahan ini diperlukan untuk menekankan pentingnya keseimbangan fungsi sebagai manusia seutuhnya yang mencakup aspek spiritual dan aspek sosial sebagaimana diamanatkan dalam tujuan pendidikan nasional.²⁰

Di tingkat sekolah, penerapan PuPB dalam proses pembelajaran menurut UNESCO adalah pada:

- a. Kurikulum formal yang mengandung pengetahuan, keterampilan, perspektif, dan nilai-nilai yang berkaitan dengan keberlanjutan,
- b. Proses pembelajaran meliputi isu-isu dalam kehidupan nyata untuk meningkatkan motivasi belajar siswa,
- c. Sekolah memiliki etos keberlanjutan yang tercermin pada perlakuan terhadap orang lain, sarana prasarana, dan lingkungan sekolah,
- d. Manajemen sekolah yang sesuai dengan prinsip keberlanjutan misalnya pengadaan barang ramah lingkungan, penggunaan air dan energi, dan pengelolaan limbah,
- e. Kebijakan sekolah yang menggambarkan ketiga aspek pembangunan berkelanjutan yaitu sosial budaya, lingkungan, dan ekonomi,
- f. Adanya interaksi yang baik antara masyarakat dan sekolah,
- g. Pengadaaan kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan lainnya yang menunjang keberlanjutan
- h. Siswa berperan aktif dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan sekolah.²¹

Pada penerapan PuPB ruang kelas, guru memiliki peran yang besar untuk menyampaikan konsep PuPB pada siswa. Gabungan PuPB dengan kompetensi pedagogis guru akan menumbuhkan keterampilan berpikir kritis, kritik sosial dan analisis konteks lokal pada siswa. Pembelajaran melibatkan proses diskusi, analisis, dan aplikasi nilai-nilai. Guru dapat mengaitkan materi yang telah ditetapkan dalam silabus dengan isu-isu terkait pembangunan berkelanjutan. Beberapa metode pembelajaran yang dapat diterapkan dalam pembelajaran antara lain simulasi, diskusi kelas, analisis isu dan *storytelling*.²²

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa standar kompetensi yang harus dimiliki oleh lulusan SD/MI/SDLB/paket A telah mempertimbangkan komponen pengetahuan, isu-isu, keterampilan,

²⁰ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2016). *Permendikbud No 20 tentang Standar Isi*. Jakarta. Hlm. 2

²¹ Unesco. (2012). *Education for Sustainable Development Sourcebook*. Paris: United Nations Educational. Hlm 46.

²² Unesco. (2012). *Education for Sustainable Development Sourcebook*. Paris: United Nations Educational. Hlm 15.

perspektif, dan nilai-nilai pokok untuk pembangunan berkelanjutan dalam setiap aspeknya (lingkungan, sosial, dan ekonomi). Kelima komponen tersebut tercermin dalam tiga dimensi kompetensi yang perlu dikuasai oleh lulusan. Sebagai panduan dalam pelaksanaan proses pembelajaran, ditetapkan standar isi yang memuat ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi peserta didik. Secara teknis, untuk melaksanakan PuPB di kelas guru dapat menyampaikan materi sesuai ruang lingkup yang telah ditetapkan kemudian dihubungkan dengan isu-isu terkait pembangunan berkelanjutan.

PuPB di Indonesia telah dilakukan di beberapa sekolah di berbagai kota. Penelitian Prabawani yang dilakukan di Kota Semarang menyimpulkan bahwa pelaksanaan PuPB di Indonesia lebih menekankan pada aspek kognitif, dimana pengetahuan mengenai lingkungan hanya dimasukkan dalam materi tematik atau muatan lokal. PuPB dilakukan oleh sekolah tanpa melibatkan pihak lain.²³ Dari penelitian Listiawati di berbagai sekolah di Indonesia dapat diketahui bahwa penanaman nilai-nilai PuPB dilaksanakan di sekolah melalui beberapa strategi pembelajaran, antara lain: 1) Integrasi ke dalam mata pelajaran; 2) melalui mulok sebagai mata pelajaran tersendiri, beberapa sekolah melaksanakan muatan lokal pendidikan lingkungan yang hanya berfokus pada perspektif lingkungan saja; 3) kegiatan kegiatan ekstrakurikuler atau program pengembangan diri; 4) pembiasaan (pembudayaan) yang merupakan penerapan dari visi misi sekolah, termasuk pelaksanaan peraturan sekolah. Dari keempat strategi tersebut, pada 19 sekolah yang diteliti, presentase perlakuan paling besar adalah melakukan penanaman nilai melalui integrasi dan pembiasaan; diikuti oleh mulok dan ekstrakurikuler, terakhir adalah pembiasaan atau pembudayaan.²⁴

Pelaksanaan PuPB di sekolah-sekolah tersebut merupakan program binaan berbagai lembaga, baik lembaga milik pemerintah, BUMN, lembaga internasional, maupun lembaga non pemerintah. Sasaran program PuPB di satuan pendidikan beragam, tergantung pada kebijakan sekolah dan program yang dikembangkan lembaga. Pihak yang menjadi sasaran adalah kepala sekolah, pendidik, peserta didik, nonpendidik, dewan sekolah dan masyarakat sekitar. Pelaksanaan dilakukan melalui pengembangan berbagai program penanaman nilai-nilai pembangunan berkelanjutan di sekolah. Model pelaksanaan program bervariasi, sebagian model hanya melibatkan sebagian dari warga sekolah, yaitu guru dan peserta didik, bahkan ada yang hanya melibatkan guru saja melalui pelatihan-pelatihan yang diberikan lembaga

²³ Prabawani, B., Hanika, I. M., Pradhanawati, A., & Budiatmo, A. (2017). Primary Schools Eco-Friendly Education in the Frame of Education for Sustainable Development. *International Journal of Environmental & Science Education* Vol 12 No 4. Hlm. 615

²⁴ Listiawati, N. (2013). Pelaksanaan Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan Oleh Beberapa Lembaga. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, Vol. 19, Nomor 3. Hlm 447.

pengembang. Namun demikian ada beberapa model yang dalam menerapkan nilai-nilai ESD telah melibatkan seluruh warga sekolah dan masyarakat di lingkungan sekolah, serta orangtua dan komite sekolah.²⁵

C. Penutup

Kesadaran untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan merupakan salah satu solusi untuk mengatasi berbagai permasalahan yang timbul akibat peningkatan aktivitas manusia. Dengan demikian, sangat penting untuk melaksanakan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan sedini mungkin. Kombinasi teknik-teknik pedagogis dengan muatan PuPB berkontribusi untuk mengajarkan kreativitas, berpikir kritis, dan menumbuhkan kemauan untuk belajar sepanjang hayat, serta semua kebiasaan yang akan mendukung tercapainya masyarakat yang berkelanjutan.

Pemerintah telah menetapkan Permendikbud No 20 dan 21 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi. Kedua peraturan tersebut menetapkan kompetensi yang perlu dimiliki oleh lulusan pada jenjang pendidikan tertentu, serta ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi peserta didik. Kompetensi yang perlu dimiliki oleh lulusan dan peserta didik diharapkan dapat menjadi bekal untuk mencapai masyarakat yang berkelanjutan. PuPB telah dilaksanakan di berbagai sekolah di Indonesia melalui pemberian wawasan dan pembiasaan atau hanya salah satu dari strategi tersebut. Keberhasilan PuPB memerlukan kerjasama semua pihak mulai dari sekolah, masyarakat, pelaku industri, organisasi non pemerintah dan pemerintah selaku pembuat kebijakan. Tugas setiap satuan pendidikan adalah mewujudkan konsep PuPB di ruang kelas dan lingkungan sekolah melalui program sekolah serta bekerja sama dengan pihak lain di sekitar sekolah.

Daftar Pustaka

- Blatchford, J., Smith, K. C., & Samuelsson, I. P. (2010). *ESD in Early Years*. World Organization for Early Childhood Education.
- Kates, R., Parris, T., & Leiserowitz, A. (2005, April). What is Sustainable Developments? Goals Indicators, Values and Practises. *Environment Science and Policy for Sustainable Development*, p. 11.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2016). *Permendikbud No 20 tentang Standar Kompetensi Lulusan*. Jakarta.

²⁵ Listiawati, N. (2013). Pelaksanaan Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan Oleh Beberapa Lembaga. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, Vol. 19, Nomor 3. Hlm 448.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2016). *Permendikbud No 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi*. Jakarta.

Lampa, I., Greculescu, A., & Todorescu, L.-L. (2012). Education for Sustainable Development – Training the Young. *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 78, 120-124.

Laurie, R., Tarumi, Y. N., McKeown, R., & Hopkins, C. (2016). Contributions of Education for Sustainable Development (ESD) to Quality Education: A Synthesis of Research. *Journal of Education for Sustainable Development* 10:2 , 226-242.

Listiawati, N. (2013). Pelaksanaan Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan Oleh Beberapa Lembaga. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, Vol. 19, Nomor 3, 430-450.

National Research Council. (1999). *Our Common Journey: A Transition Toward Sustainability*. Washington DC: National Academy Press.

Panuluh, S., & Fitri, M. R. (2016). *Perkembangan Pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia September 2015-September 2016*. International NGO Forum on Indonesian Development.

Prabawani, B., Hanika, I. M., Pradhanawati, A., & Budiatmo, A. (2017). Primary Schools Eco-Friendly Education in the Frame of Education for Sustainable Development. *International Journal of Environmental & Science Education* Vol 12 No 4 , 607-616.

Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta.

Republik Indonesia. (2009). *Undang-undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta.

Republik Indonesia. (2017). *Undang-undang No 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)*. Jakarta.

Subdirektorat Statistik Lingkungan Hidup. (2017). *Statistik Lingkungan Hidup Indonesia 2017*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Unesco. (2006). *Education for Sustainable Development Toolkit*. Paris: Unesco Education Sector.

Jurnal Madaniyah, Volume 8 Nomor 2 Edisi Agustus 2018
Hafizah Ghany H, Penyelenggaraan Pendidikan Untuk
Pembangunan Berkelanjutan di Sekolah Dasar

ISSN (printed) : 2086-3462
ISSN (online) : 2548-6993

Unesco. (2010). *Education for Sustainable Development Lens: A Policy and Practice Review Tool*. Paris: Unesco Education Sector.

Unesco. (2012). *Education for Sustainable Development Sourcebook*. Paris:
United Nations Educational.